

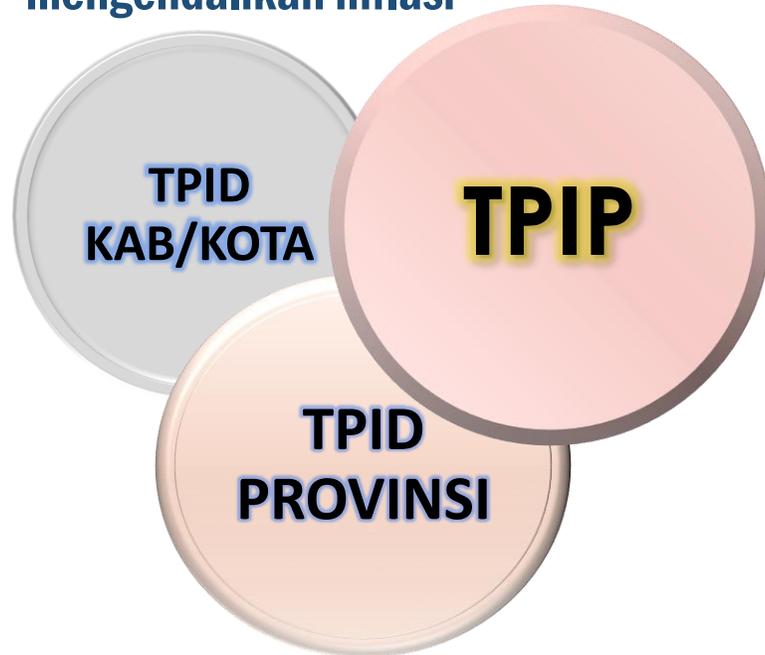


POKOK-POKOK HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019

Dr. Iskandar Simorangkir SE. MA
(Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat)

Disampaikan dalam Rakorpusda TPID 2019
Jakarta, 21 November 2019

Ditetapkannya Keppres 23/2017 tentang TPIN mengindikasikan semakin seriusnya Pemerintah dalam mengendalikan inflasi



Penyelenggaraan Rakorpusda TPID seperti saat ini merupakan amanat dari Keppres 23 tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya.

Rakorpusda TPID diselenggarakan satu kali dalam satu tahun untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.

TPI PUSAT (TPIP)	
Ketua	Menko Perekonomian
Waka I	Gubernur Bank Indonesia
Waka II	Menteri Keuangan
Waka III	Menteri Dalam Negeri
Anggota	1. Menteri Perdagangan
	2. Menteri Pertanian
	3. Menteri Perhubungan
	4. Menteri ESDM
	5. Kepala Bappenas
	6. Menteri PU & PR
	7. Menteri BUMN
	8. Sekretaris Kabinet
	9. Kepala Kepolisian RI
Sekretaris	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian

TPIP dibantu Kelompok Kerja dan Sekretariat. Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja & Sekretariat ditetapkan dengan Kepmenko Perekonomian selaku Ketua TPIP

TPID PROVINSI	
Ketua	Gubernur
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris & Angg	Pimpinan OPD terkait

TPID KABUPATEN/KOTA	
Ketua	Bupati / Walikota
Wakil Ketua	Pejabat KPwDN BI
Sekretaris & Angg	Pimpinan OPD terkait

Tahun	Jumlah TPID
2016	507
2017	524
2018	532
2019	542

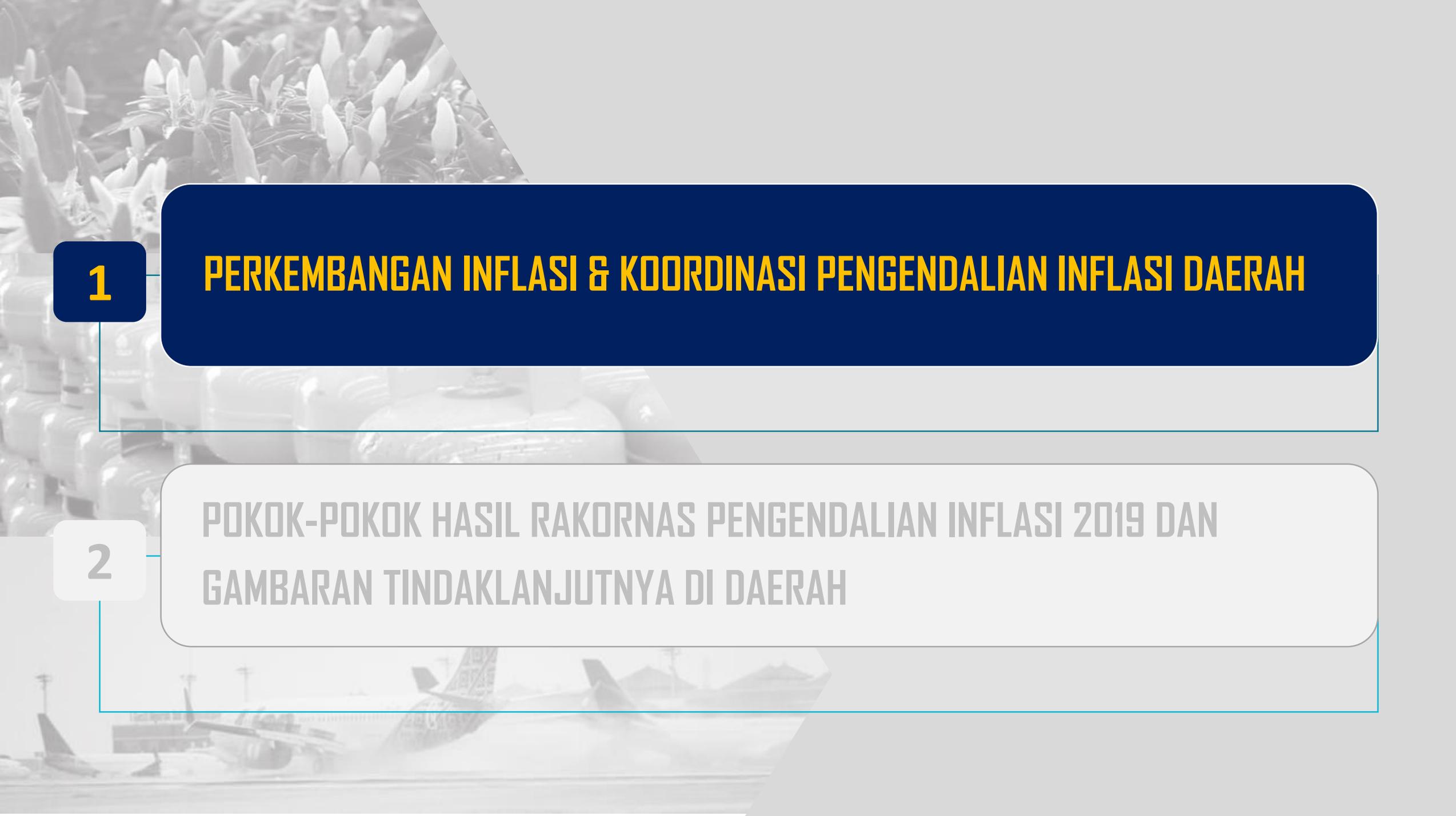
34 Provinsi
508 Kab/Kota

1

PERKEMBANGAN INFLASI & KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

2

POKOK-POKOK HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019 DAN GAMBARAN TINDAKLANJUTNYA DI DAERAH



1

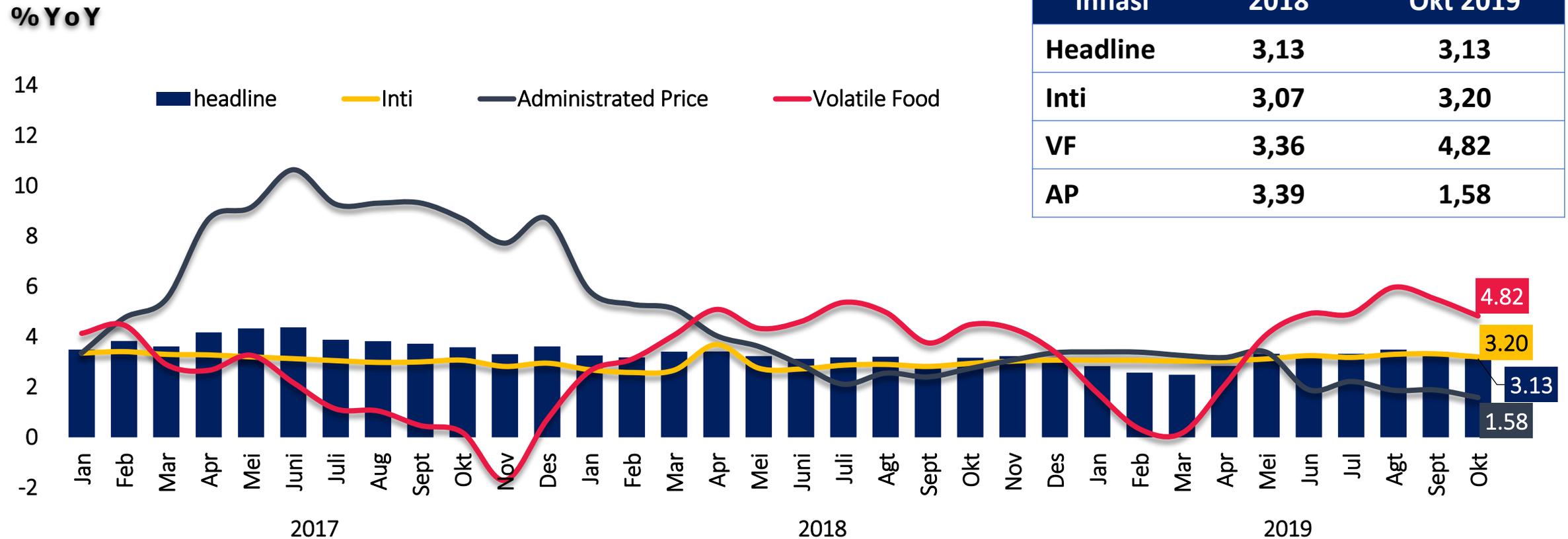
PERKEMBANGAN INFLASI & KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

2

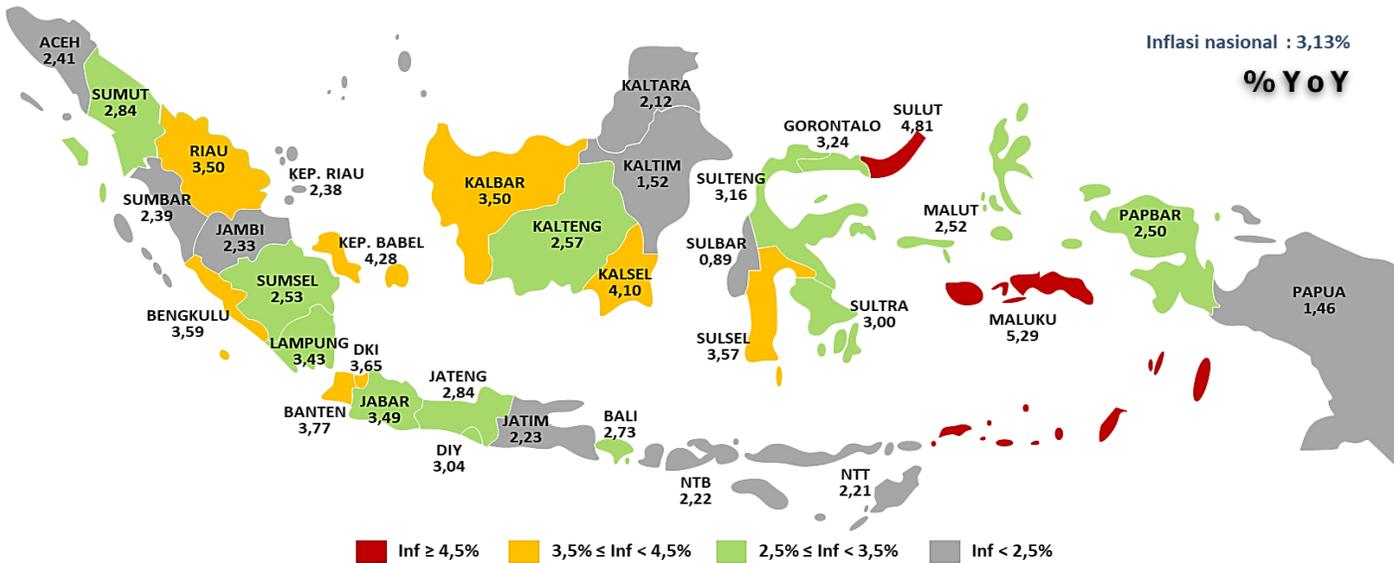
**POKOK-POKOK HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019 DAN
GAMBARAN TINDAKLANJUTNYA DI DAERAH**

REALISASI INFLASI s.d OKTOBER 2019 MASIH TERJAGA

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi inflasi pada Oktober 2019 untuk kelompok AP menunjukkan penurunan yang signifikan karena adanya koreksi tiket pesawat sejak Juni'2019. Sementara kelompok inti cenderung stabil meskipun sebelumnya sempat ada kenaikan harga emas global serta volatile food (VF) telah mulai mengalami penurunan yang didorong penurunan harga aneka cabai yang sebelumnya terus menyumbang inflasi sejak Maret s.d Agustus 2019.

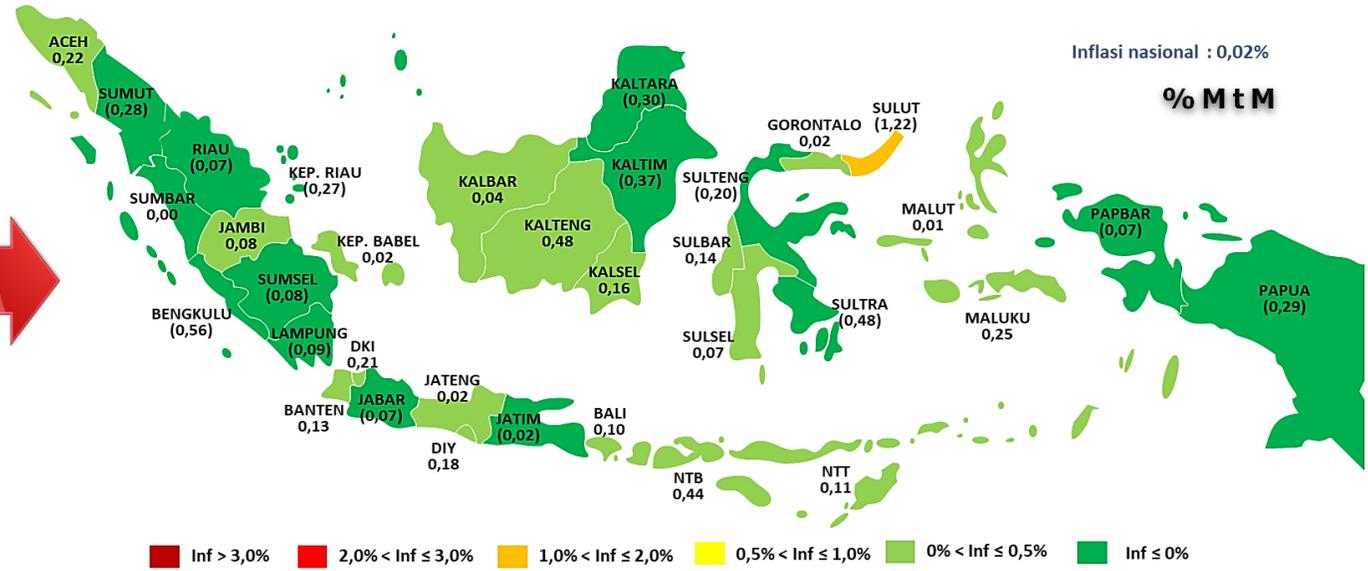


PERKEMBANGAN INFLASI SPASIAL s.d OKTOBER 2019



- Secara spasial, realisasi inflasi IHK pada Oktober 2019 (% yoy) di seluruh wilayah masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2019 sebesar 3,5±1%.
- hampir seluruh provinsi Inflasi masih terjaga dalam rentang sasaran, kecuali Maluku (5,29%) dan Sulawesi Utara (4,81%) yang disumbang oleh inflasi angkutan udara, cabai rawit, tomat sayur.

- Secara bulanan (% mtm) separuh provinsi mencatatkan inflasi <0,5% dan sebagian lainnya mengalami deflasi.
- **Rata-rata inflasi disumbang oleh kenaikan harga tomat sayur, cabai rawit, daging ayam ras, beras dan nasi dengan lauk.**
- Sebagian lainnya yang mengalami deflasi antara lain disumbang oleh penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan angkutan udara.



KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam rangka menjaga realisasi inflasi dlm rentang target yang telah ditetapkan, TPIP melakukan berbagai upaya salah satunya melalui penyampaian surat kepada TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota terutama untuk lebih fokus pada pengendalian inflasi VF yang telah ditargetkan pada kisaran 4-5%.

SURAT

1

Surat Menko kepada Ketua TPID (Ka. Daerah) No. EK.2.1/85/M.EKON/04/2019

2

Surat Menko kepada Gubernur Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah No. EK.2.1/202-204/M.EKON/08/2019

3

Surat Menko kepada Ketua TPID (Ka. Daerah) No. EK.2.1/205/M.EKON/08/2019

4

Surat Kepala Sekretariat TPIP kepada seluruh Sekda No. EK.2.1/178/D.I.M.EKON/05/2019

5

Surat Kepala Sekretariat TPIP kepada seluruh Sekda No. EK.2.1/270/D.I.M.EKON/08/2019

SUBTANSI

Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019

Evaluasi dan rekomendasi atas realisasi inflasi semester I 2019 Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berada diatas sasaran inflasi nasional.

TPID diharapkan melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga dalam rangka menjaga realisasi inflasi 2019 terkendali

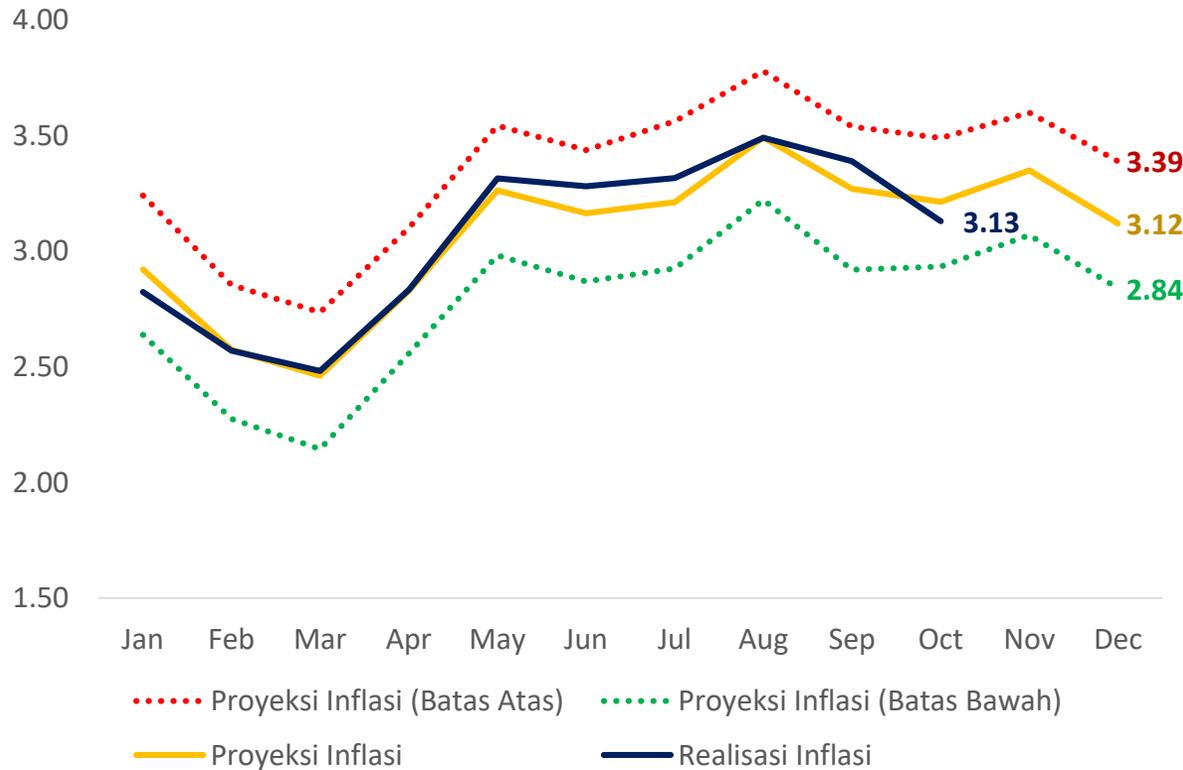
TPID diharapkan melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi/stabilisasi harga dalam rangka menjaga realisasi inflasi HBKN 2019 dapat terkendali

Langkah-langkah koordinasi mitigasi risiko dari kenaikan harga cabai yang terjadi diseluruh daerah sejak April dan terus meningkat.

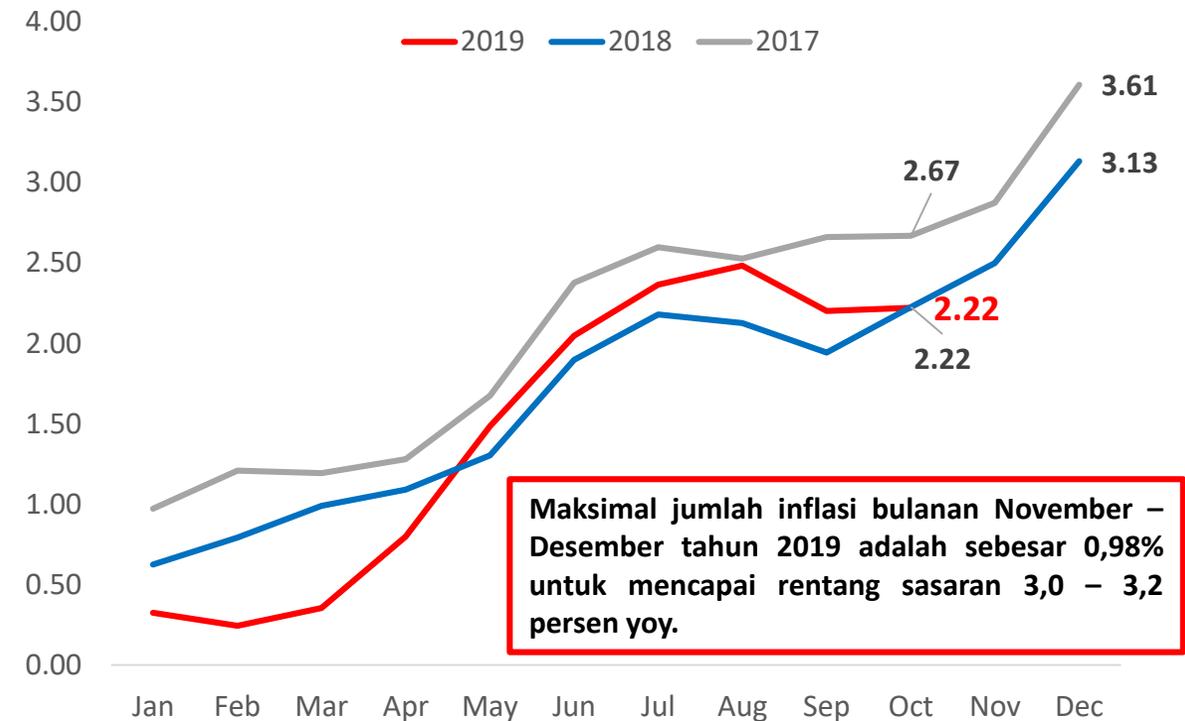
OUTLOOK INFLASI NASIONAL 2019

Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis hingga Oktober 2019, inflasi umum diproyeksikan masih dalam rentang sasaran dengan rentang proyeksi 2,84% - 3,39% (yoy). Tekanan Inflasi pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan didorong oleh kenaikan harga beras (luasan panen yang semakin berkurang); daging ayam; dan tarif angkutan. Tekanan inflasi akan tertahan via koreksi harga komoditas hortikultura terutama aneka cabai sampai akhir tahun 2019.

Proyeksi Inflasi Tahun 2019



Perkembangan Inflasi Ytd Tahun 2017, 2018, dan 2019



1

PERKEMBANGAN INFLASI
DAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

2

POKOK-POKOK HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019 DAN
GAMBARAN TINDAKLANJUTNYA DI DAERAH

ARAHAN WAPRES RI DALAM RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019

1

“Inflasi sebagai salah satu indikator tingkat kemajuan negara harus terus dijaga pada tingkat yang rendah dan stabil untuk dapat memberikan cukup stimulus pada sisi produksi, dunia usaha dan tidak memberikan tekanan yang besar kepada konsumen”

2

“Kepala daerah berperan menjaga keseimbangan sisi pasokan produsen dan konsumen dengan jalan mendorong produktivitas pangan, mempermudah investasi, menjaga kelancaran distribusi, menyederhanakan rantai pasok, mengefektifkan fungsi pasar, dan meningkatkan kerjasama daerah”

3

“Pelaksanaan tugas segenap aparat penegakan hukum di tingkat daerah diharapkan dapat disinkronkan dan tidak menjadi disinsentif bagi kebijakan pembangunan daerah”

4

“Sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk menciptakan ekosistem stabilitas inflasi yang sangat dibutuhkan pelaku usaha dalam memproduksi”

HASIL-HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019 (1)

1

“Mengoptimalkan infrastruktur pertanian dan logistik lewat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”

Pembangunan jalan daerah yg terkoneksi ke jalan tol dan/atau jalan negara

memperlancar konektivitas serta menghubungkan pusat produksi dgn pasar

Pembangunan pasar-pasar pengumpul

sebagai pusat distribusi komoditas yg didukung dengan tersedianya transportasi barang

Implementasi sistem pergudangan berbasis teknologi informasi

mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

2

“Inovasi pengembangan model kerja sama antardaerah yg mengoptimalkan kelembagaan ekonomi dari tingkat desa”

Adopsi model KAD dengan mengoptimalkan BUMD Provinsi sebagai inisiator

Mendukung efisiensi dan sinergi antar daerah sesuai dgn keunggulan kompetitif masing-masing

Optimalisasi kelompok tani, gapoktan, BUMDes dlm perluasan pasar, standarisasi produk pertanian, peningkatan produktivitas

Mitigasi resiko dengan berbasis kelompok, memberdayakan masyarakat desa, dan optimalisasi dana desa

Penyediaan data pasokan pangan daerah yg handal & berkesinambungan utk mendukung PIHPS

Mendorong kerjasama daerah, meningkatkan kualitas kebijakan dengan berbasis data, mengurangi asimetri informasi

HASIL-HASIL RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2019 (2)



“penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi guna mendorong peningkatan produksi pertanian & perluasan akses pasar bagi petani”

Penggunaan alat pendukung pertanian berbasis teknologi informasi

peningkatan produktivitas pertanian

Perluasan dan peningkatan efektivitas penyaluran subsidi pertanian non-tunai

mendukung peningkatan produktivitas, ketepatan sasaran penyaluran, & governance

Pemanfaatan platform e-commerce (marketplace dan agregator)

perluasan akses pasar. Kepastian harga



ATM' program-program kerja TPID lain sebagai salah satu pertimbangan penyusunan program kerja TPID.

Evaluasi program kerja saat ini, program kerja yang disusun harus langsung menasar ke komoditas determinan inflasi daerah

Menyesuaikan program kerja saat ini sesuai dengan determinan inflasi

Studi tiru kepada TPID yg mempunyai karakteristik permasalahan yg sama

Sinergi antar TPID, membuka ruang kerjasama antar daerah

1

OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR VIA SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN (SUMATERA UTARA)

Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat berperan dalam membangun infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun dan memperlancar konektivitas antar daerah dan distribusi barang



Untuk dapat mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun dan dapat menghubungkan simpul pusat-pusat ekonomi/kawasan ekonomi/kawasan industri, masih diperlukan infrastruktur pendukung dan moda angkutan yang terintegrasi untuk memperlancar konektivitas antar daerah dan distribusi barang.



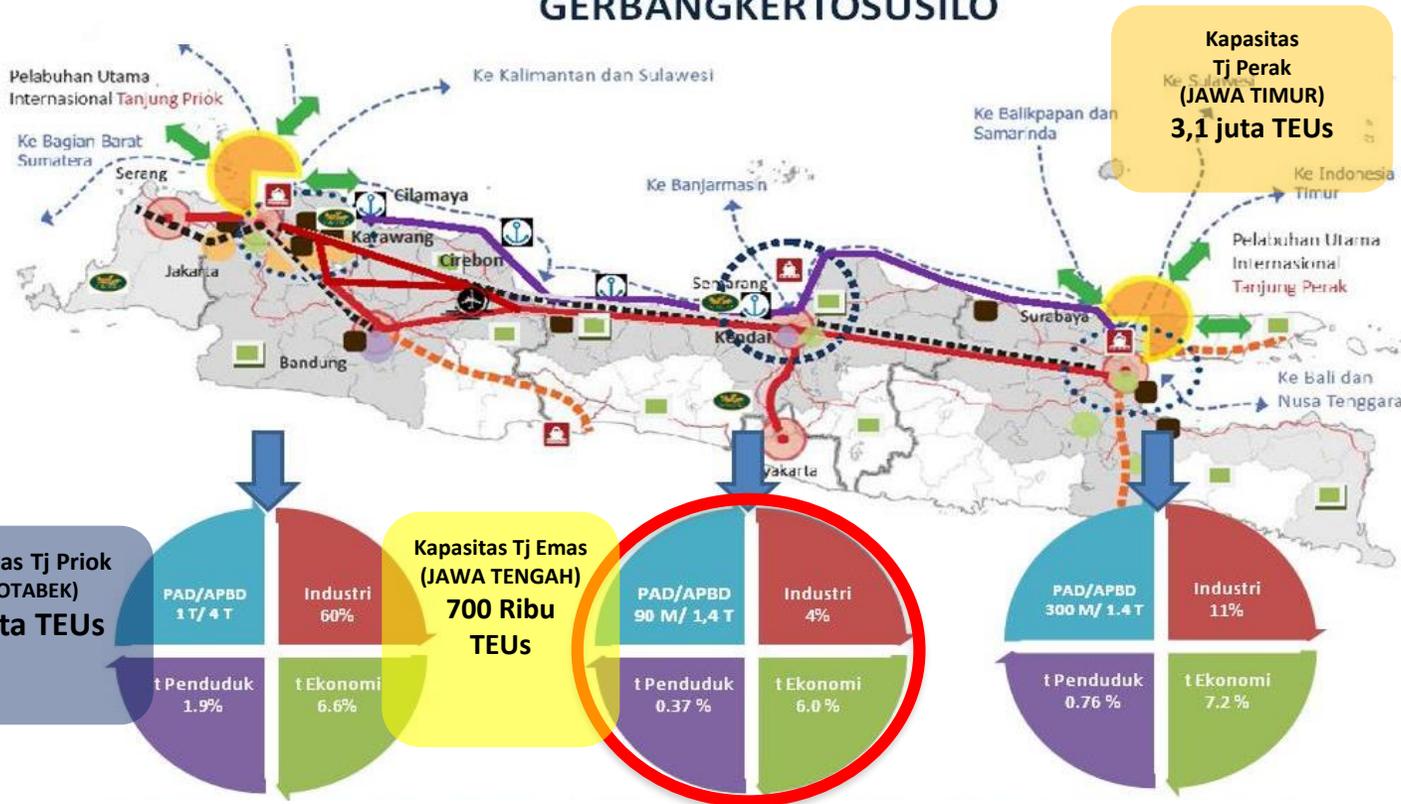
selama ini pengangkutan barang hasil produksi Sei Mangkei dilakukan melalui Pelabuhan Belawan yang jaraknya mencapai 148 Km (ditempuh kurang lebih 3 jam). Padahal terdapat pelabuhan yang lebih dekat dan dapat dioptimalkan, yaitu pelabuhan Kuala Tanjung yang hanya berjarak 53 Km atau dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam namun belum didukung dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat berperan dalam membangun jalan yang dapat mendukung konektivitas antara KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

1

OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR VIA SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KENDAL (JAWA TENGAH)

Beberapa daerah telah berusaha mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada dengan membangun infrastruktur pendukung dan mengintegrasikannya.

SEBARAN EKONOMI MAKRO JABODETABEK – KEDUNGSEPUR – GERBANGKERTOSUSILO



PERMASALAHAN

a. Pelabuhan

- Pelabuhan Tanjung Mas (penurunan struktur tanah, sedimentasi, banjir rob, kedalaman laut hanya 9 meter)
- Kapasitas logistik Tanjung Mas hanya 700 ribu Teus/tahun (8% dari sislognas)

b. KI Kendal

- Daya saing KI Kendal untuk menarik FDI kurang kompetitif
- Masih terbatasnya sarpras pendukung kawasan

STRATEGI PENGEMBANGAN

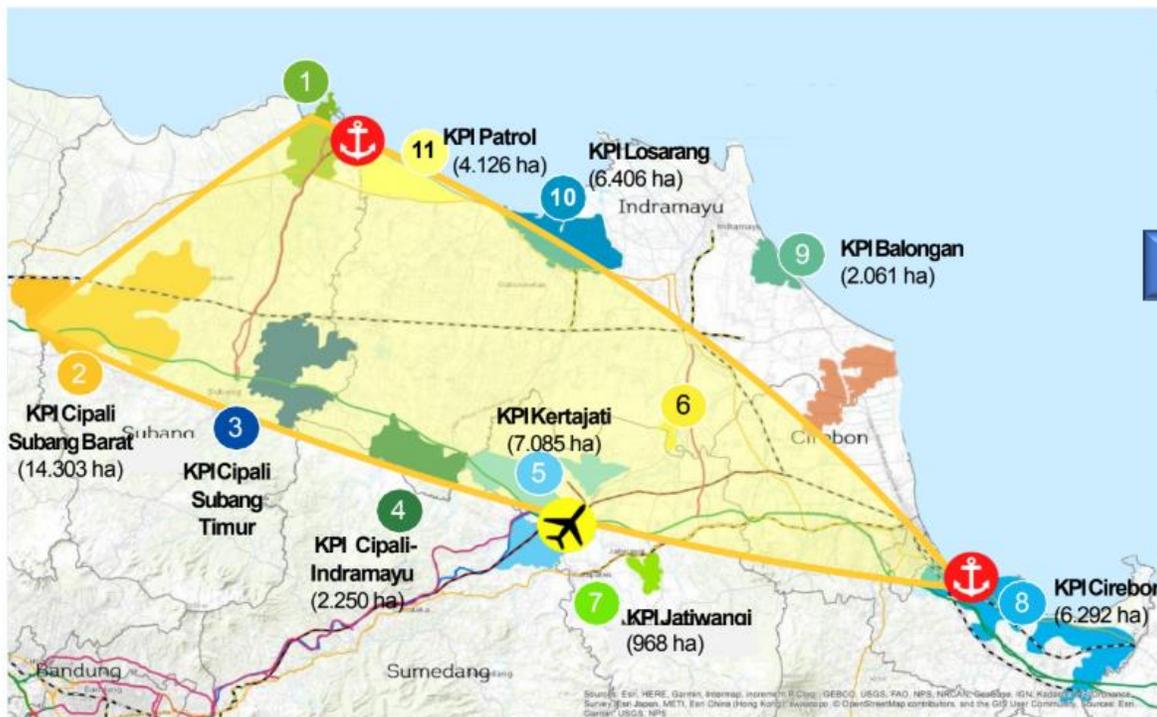
1. Pembangunan Kendal Port kapasitas 1,5 juta TEUS untuk turunkan biaya logistik 3-5%.
2. Penetapan KI Kendal menjadi KEK (INDUSTRI 4.0)
3. Perlu dukungan infrastruktur untuk pengembangan KI Kendal (air, listrik, gas, dll) agar menjadi prioritas dalam APBN



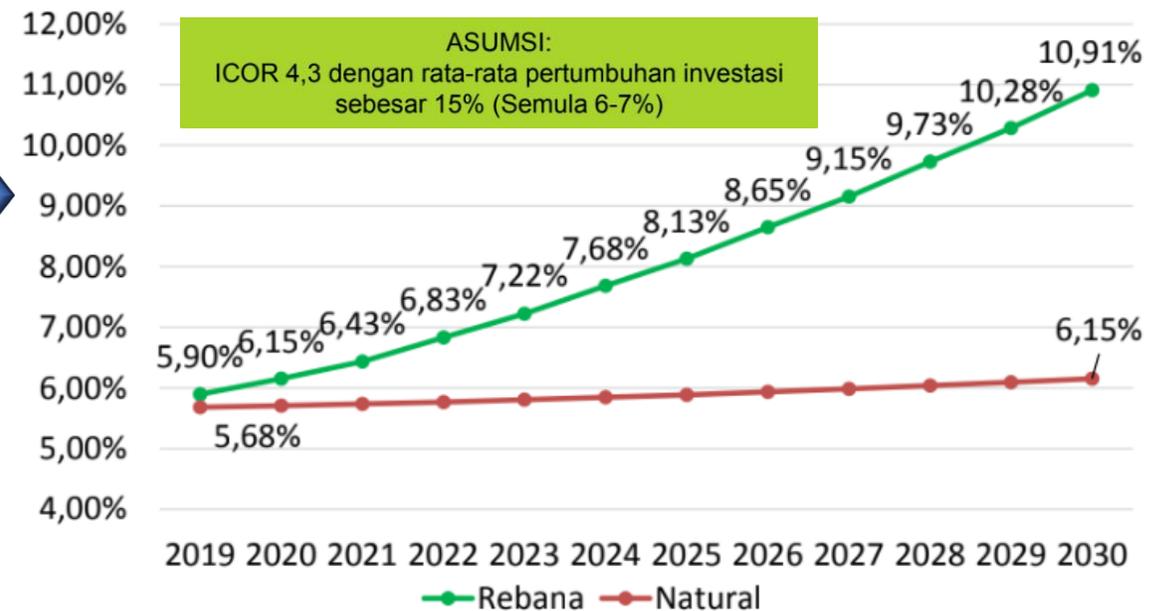
OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR VIA SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA (CIREBON-SUBANG-MAJELENGKA, JAWA BARAT)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan pengembangan Kawasan dengan memperhatikan infrastruktur yang sudah tersedia saat ini. Pengembangan kawasan ini diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

PETA KAWASAN REBANA 54.260 HA



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT 2019-2030



2

INOVASI PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL KAD: INFORMASI HARGA PANGAN DALAM Mendukung KAD (JAWA TENGAH)

Kebijakan ketahanan pangan diwujudkan melalui sinergi dengan BUMD dan kerjasama antar daerah dengan pemanfaatan sistem informasi harga pangan yang akurat.

TUJUAN PENGUATAN SINERGI PENGELOLAAN BUMD :

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
2. Mendukung pertumbuhan melalui peningkatan produktifitas & pengembangan bisnis perusahaan;
3. Mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

RUANG LINGKUP PENGUATAN SINERGI

1. Peningkatan kompetensi SDM;
2. Investasi usaha sektor riil;
3. Optimalisasi pemasaran produk dan jasa layanan;
4. Penguatan permodalan;
5. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan;
6. **Ketahanan pangan;**
7. Penanganan permasalahan BUMD;
8. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Sistem Informasi

Pemanfaatan basis data terpadu untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak manajemen dan pengambil keputusan, serta stakeholder sehingga sistem informasi harus berdasarkan tata kelola yang termuat dalam sebuah *master plan* dan dikembangkan bersinergi sesama BUMD.



**PEMROV
JATENG**



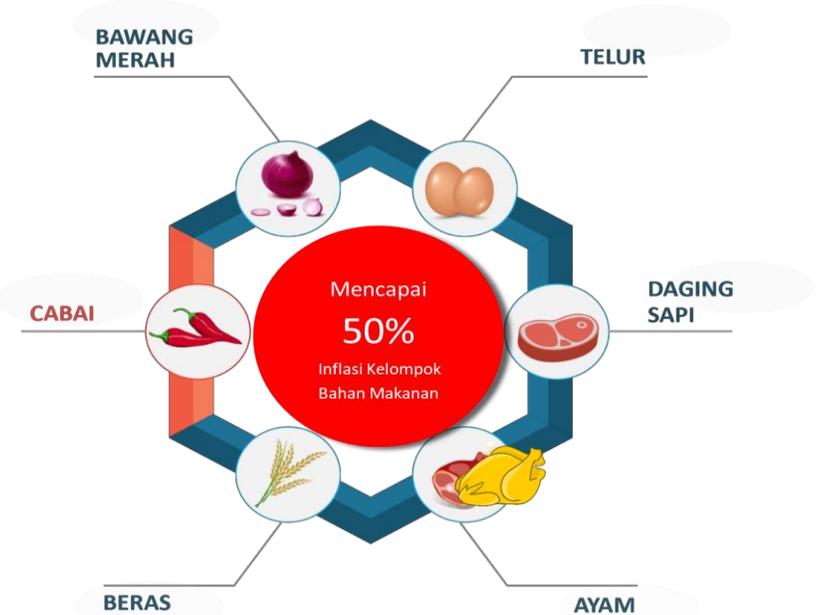
2

INOVASI PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI MELALUI PENGEMBANGAN MODEL KAD: SINERGI BUMD DAN KAD DALAM PENYEDIAAN PANGAN (DKI JAKARTA)

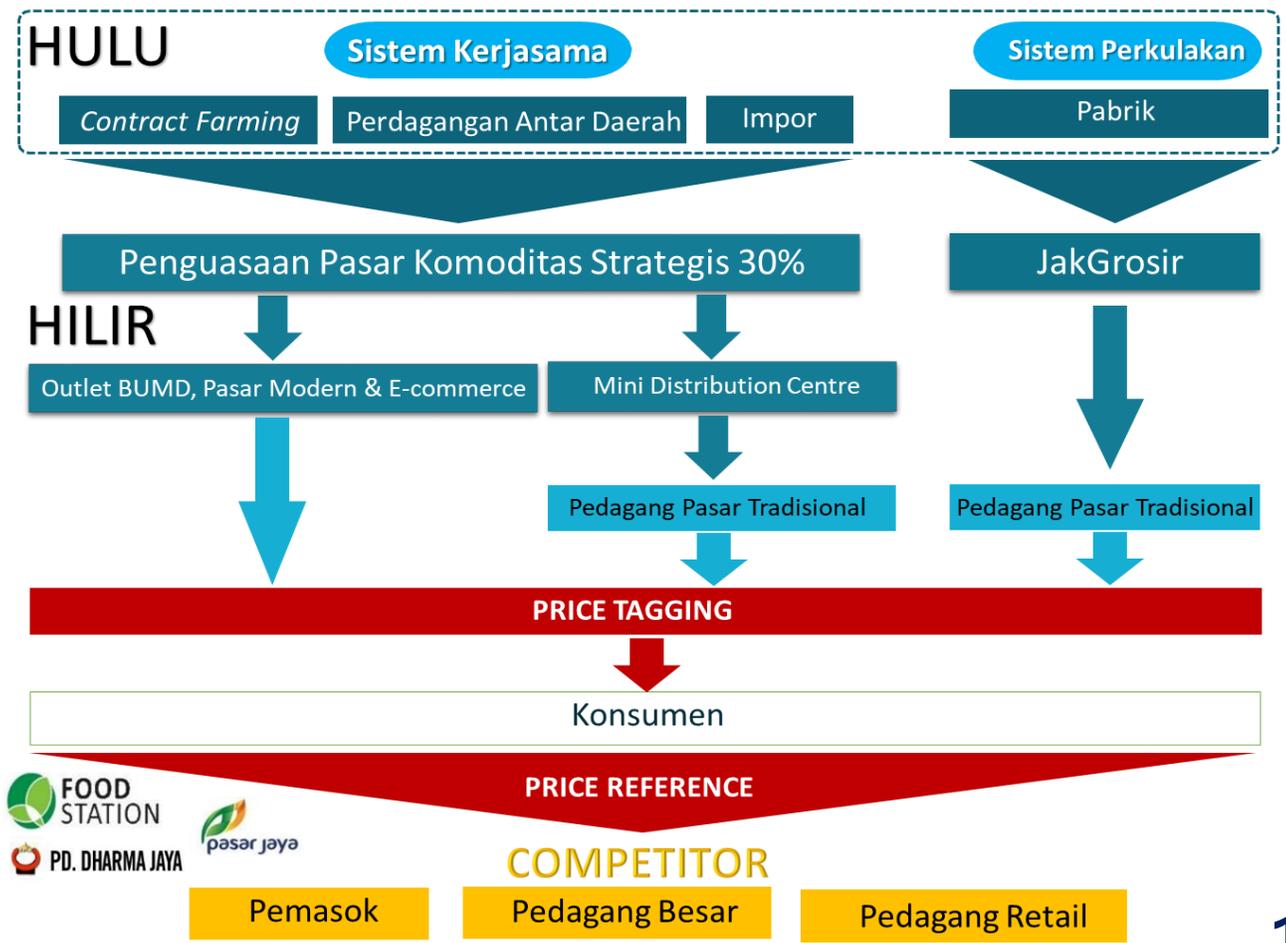
Strategi utama pengendalian inflasi di DKI Jakarta salah satunya yaitu program pangan murah dan peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka kesinambungan pemenuhan kebutuhan pangan di Jakarta melalui sinergi BUMD.

BUMD Pangan

1.  **FOOD STATION** Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang terbesar di Asia Tenggara
2.  **PD Dharma Jaya** Pengelola Rumah Potong Hewan Terbesar
3.  **pasar jaya** Pengelola 153 Pasar Tradisional



Model Bisnis BUMD Pangan





PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGEFISIENKAN TATANIAGA

Dengan memanfaatkan teknologi, semua pihak yang terlibat dalam tataniaga dapat lebih efisien. Konsumen dapat memilih lebih bebas produk yang ditawarkan produsen, memilih moda angkutan, waktu pengiriman, dan bebas melihat perkembangan harga. Produsen juga dapat dengan bebas menawarkan produk dengan spesifikasi dan harga yang beragam, hingga memilih moda dan waktu pengiriman yang diinginkan. Perusahaan logistik juga dapat memantau kebutuhan konsumen maupun produsen untuk dapat mengoptimalkan pengiriman.



3

KELANCARAN KONEKTIVITAS JUGA DAPAT DIDUKUNG MELALUI PEMANFAATAN TI

Pembangunan infrastruktur belum cukup untuk menunjang konektivitas, sehingga perlu dukungan akses langsung ke pasar melalui adanya pasar pengumpul. Dari pasar pengumpul dapat menggunakan moda transportasi yang lebih besar menuju pasar di kota dengan akses jalan tol dan kereta api yang sudah memadai. Seluruh kegiatan distribusi ini juga perlu didukung penggunaan teknologi informasi.



3

SMART FARMING UNTUK MENDORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

Pemanfaatan sensor dan teknologi informasi untuk mengukur debit air, kelembaban, suhu, kesuburan tanah, dan cuaca dalam kegiatan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pilot project penerapan smart farming dilakukan oleh PT. MSMB di Desa Sidomukti, Kec. Minggir, Sleman, DIY.



Luas lahan 4.500 m², dengan peruntukkan: 3.000 m² untuk budidaya horti; 800 m² ikan nila milik kelompok, dan 2.000 m² untuk ternak (milik kel ternak mandiri, lokasi terpisah).



RiTx sensor: debit air, kelembaban, suhu, kesuburan, cuaca. FisTx sensor: water checker, nano buble / kincir, autofeeder. LiTx sensor: amoniak, pengolahan limbah: biogas, pupuk.



Desa Sidomukti, kec. Minggir, kab. Sleman, DIY

Legenda:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1 Pintu Masuk - Rumah Jaga - Kamar Mandi - Gudang [Luas 96, 45 m ²] | 6 Kolam Ikan Nila 3 [Luas 169, 03 m ²] | 12 Lahan Kacang Panjang [Luas 64,56 m ²] | 19 Pohon Pepaya California |
| 2 Lahan Kambing 1 [Luas 96, 45 m ²] | 7 Kolam Ikan Nila 4 [Luas 225, 83 m ²] | 13 Lahan Buncis [Luas 25,50 m ²] | 20 Pohon Pisang |
| 3 Instalasi Pengolahan Limbah & Kandang Kambing 2 | 8 Lahan Tumpang Sari [Luas 150, 08 m ²] | 14 Lahan Bayam Merah [Luas 162,71 m ²] | 21 Lahan Padi Pak. Candra [Tidak dikerjasamakan] |
| 4 Kolam Ikan Nila 1 [Luas 74, 86 m ²] | 9 Lahan Terong [Luas 112, 99 m ²] | 15 Lahan Pakcoy [Luas 158,76 m ²] | 22 Lahan Milik Warga [Tidak dikerjasamakan] |
| 5 Kolam Ikan Nila 2 [Luas 163, 53 m ²] | 10 Lahan Tomat [Luas 50, 26 m ²] | 16 Lahan Selada [Luas 91,63 m ²] | |
| | 11 Lahan Timun [Luas 68,29 m ²] | 17 Lahan Seledri [Luas 68,36 m ²] | |
| | | 18 Lahan Buncis [Luas 58,36 m ²] | |



BERBAGAI PROGRAM UNGGULAN TPID 2018 : AMATI, TIRU MODIFIKASI (1)

Program unggulan TPID bervariasi berdasar karakteristik daerah dan permasalahan yang dihadapi.

No.	TPID	Nama Program	Deskripsi Program
1.	Provinsi Jawa Timur	Program Hulu Hilir Agromaritim	Program Hulu Hilir Agromaritim komoditas padi di lima kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 33 poktan
2.	Kabupaten Banyuwangi	Sinergi Hulu-Hilir BILAPERDU, BUMDes peduli inflasi dan Gapoktan	Sinergi hulu-hilir BILAPERDU (mobil layanan pertanian terpadu), BUMDes peduli inflasi dan Gapoktan dalam menjaga kesinambungan produksi dan pasokan pangan, serta meningkatkan efisiensi tata niaga pangan. Program ini berdampak pada ketersediaan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
3.	Kabupaten Bangli	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Pengembangan kawasan bawang merah di luar kawasan Kintamani dan terjalannya kerjasama antardaerah.
4.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Berkah Mart	Berkah Mart adalah toko ritel yang dikelola oleh BUMD & BUMDes yang didirikan di desa – desa di seluruh Provinsi Kep. Bangka Belitung.
5.	Kota Surakarta	Pasar Murah dan Kios Mirunggan	Pasar Murah Telur Kota Surakarta dan Pendirian Kios Mirunggan TPID Kota Surakarta, Sinergi TPID Kota Surakarta dengan BUMN/BUMD, Produsen, dan Distributor Utama.
6.	Kabupaten Bungo	Pembentukan Klaster Sapi	Peningkatan Ketersediaan Ternak Sapi Pedaging Melalui Kerjasama Pembentukan Klaster Sapi SPR Kuamang Abadi di Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Tahun 2018.
7.	Provinsi Jawa Tengah	Rice Market Center (RMC)	Sinergi antar instansi dan para pelaku di rantai nilai beras dari hulu hingga hilir untuk mempertemukan pasokan dan kebutuhan konsumen beras dengan memotong rantai distribusi dan manajemen stok.
8.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengembangan Industri Pakan Ternak dan Breeding Farm Komoditas Ayam Ras dan Telur	Penerapan Program Pengembangan Industri Pakan Ternak dan Breeding Farm Komoditas Ayam Ras dan Telur bertujuan untuk meminimalisasi dampak dari monopoli yang dilakukan oleh pemasok DOC yang menyebabkan harga menjadi lebih tinggi.
9.	Kota Padang	Kerjasama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kota Padang, Pemberdayaan KRPL & kerjasama dgn stakeholders lain	Kota Padang melalui Koperasi Pegawai Negeri Balaikota telah melakukan kerjasama dengan pengusaha muda pengelola kelompok ternak Lembu Makmur dalam pemenuhan daging sapi, pemanfaatan lahan kosong dan teknologi pertanian tepat guna, serta pengembangan KRPL (Kelompok Rumah Pangan Lestari).
10.	Kabupaten Sumbawa	Tata Kelola SIANDINI (Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi)	Merupakan Sistem Pendukung Keputusan. Tahapan arus data & informasi melalui Siandini sebagai SPK adalah survey harga, pengolahan data otomatis, analisis penyebab dan risiko, rapat tpid forum pengambil keputusan, penyusunan regulasi dan aksi pengendalian inflasi.



BERBAGAI PROGRAM UNGGULAN TPID 2018 : AMATI, TIRU MODIFIKASI (2)

Program unggulan TPID bervariasi berdasar karakteristik daerah dan permasalahan yang dihadapi.

No.	TPID	Nama Program	Deskripsi Program
11.	Kota Samarinda	Penjualan Produk Ayam Beku oleh PDPAU Kota Samarinda	Penjualan Produk Ayam Beku oleh Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PDPAU) Kota Samarinda. Program ini menyediakan alternatif baru bagi masyarakat sehingga pemerintah dapat mengatasi lonjakan kenaikan harga daging ayam ras.
12.	Nusa Tenggara Barat	Program Tanggap Inflasi Paska Gempa Bumi	Penerapan Program Tanggap Inflasi Paska Gempa Bumi bertujuan untuk melakukan mitigasi atas risiko meningkatnya harga kebutuhan pokok yang dapat menurunkan daya beli masyarakat pasca bencana alam.
13.	Kabupaten Blitar	Kerjasama Antardaerah (Penyediaan Komoditas Unggulan Telur Blitar)	Bertujuan menjaga stabilitas harga telur ayam nasional. Terciptanya efisiensi penyaluran rantai distribusi dan memperluas kesempatan peternak dalam memasarkan produknya melalui koperasi maupun BUMD.
14.	Kota Balikpapan	Kampung Wisata Peduli Inflasi	Merupakan program pengembangan kampung berbasis peningkatan kemandirian pangan khususnya komoditas inflasi. Program ini dilakukan melalui gerakan tanam cabai warna-warni dan tanaman komoditas hortikultura secara urban farming, sekaligus edukasi pengendalian inflasi & pelatihan budidaya cabai kepada warga.
15.	Kota Ternate	Revitalisasi BUMD Kota Ternate	Revitalisasi fungsi BUMD sebagai inventory controller and commodity price maker untuk memperbaiki tata niaga pangan sehingga harga pangan dan jumlah pasokan terjaga tidak lagi dikuasai oleh pihak swasta.
16.	Kota Lhokseumawe	Forum Ulama, Inspeksi Pasar, Pasar Murah Ramadhan Fair 1439H	TPID difasilitasi KPw BI Lhokseumawe mengundang para Ustadz & Ulama besar Kota Lhokseumawe agar para tokoh menyisipkan konten belanja bijak & konsumsi secukupnya dalam setiap Khutbah yang disampaikan.
17.	Kota Kediri	Kemitraan Berkelanjutan dgn Mitra Penyedia Komoditas Bahan Pangan	Kemitraan Berkelanjutan antara TPID Kota Kediri dengan Mitra Penyedia Komoditas Bahan Pangan Terpilih untuk Menjaga Volatilitas Harga dan Capaian Inflasi Kota Kediri.
18.	Kota Pematang Siantar	Gerakan Tanam Serempak	Gerakan tanam serempak bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dengan pemanfaatan varietas unggul baru serta untuk mewujudkan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
19.	Provinsi DKI Jakarta	Kerjasama pasokan telur ayam ras	Kerjasama antardaerah untuk mendapatkan pasokan telur ayam ras bagi kebutuhan Provinsi DKI Jakarta berdampak pada perlambatan inflasi telur ayam ras. Pasca pengiriman telur ayam ras dari Blitar pada bulan April 2018, inflasi telur ayam ras terpantau menurun.
20.	Kabupaten Jember	Pembangunan Integrated Cold Storage (ICS)	Sinergi TPID Kabupaten Jember dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka pembangunan Integrated Cold Storage (ICS) sebagai upaya pengendalian inflasi di sektor perikanan tangkap.

TERIMA KASIH